



**FAKTOR YANG MEMENGARUHI TENAGA KERJA DI JAWA
BARAT**

Kinanti Laras Arum^{1*} dan MB. Nani Ariani²

Jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan FEB UPNVJ^{1,2}

Email: kinantilaras21@gmail.com^{1*} dan nani.upnvj@gmail.com²

Artikel info

Artikel history:

Diterima : 28-01-2022

Diterima dalam bentuk

revisi : 05-02-2022

Diterima dalam bentuk

revisi : 21-02-2022

Kata Kunci: penduduk;
upah; pemerintah
pengeluaran; tenaga kerja

Keyword: population;
wages; government
spending; labor

Abstrak

Jawa Barat adalah salah satu provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah angkatan kerja di Jawa Barat juga cukup besar, tetapi tidak semuanya tenaga kerja yang ada dapat terserap. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya ketersediaan kesempatan kerja dan kualitas manusia yang tidak cukup untuk bersaing. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya efek dari populasi, upah minimum dan pemerintah pengeluaran untuk penyerapan tenaga kerja di Jawa Barat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel dan kuantitatif analisis deskriptif didukung oleh data kuantitatif yang ada. Data kuantitatif yang digunakan berupa jumlah penyerapan tenaga kerja, upah minimum, jumlah penduduk dan pengeluaran pemerintah di Jawa Barat tahun 2010-2019. Data yang digunakan diperoleh melalui instansi-instansi tertentu dan diproses dengan menggunakan perangkat lunak *evIEWS 9*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penduduk dan upah minimum mempengaruhi lapangan kerja, sedangkan pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh pada lapangan kerja.

Abstract

*West Java is one of the provinces with the largest population in Indonesia. This shows that the number of labor force in West Java is also quite large, but not all of the existing workforce can be absorbed. This is due to the lack of availability of job opportunities and insufficient human quality to compete. This study aims to determine whether there is an effect of population, minimum wage and government spending on labor absorption in West Java. The research method used in this research is panel data regression analysis and quantitative descriptive analysis supported by existing quantitative data. Quantitative data used in the form of total employment, minimum wages, population, and government spending in West Java in 2010-2019. The data used are obtained through certain agencies and processed using *evIEWS 9* software. The results of this study indicate that population and minimum wages affect*

employment, while government spending has no effect on employment.

Corresponden author: Kinanti Laras Arum

Email: kinantilaras21@gmail.com

artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi

CC BY SA

2022



Pendahuluan

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang banyak dan jumlah pengangguran tenaga kerja cukup tinggi. Masalah ini yang belum bisa terpecahkan karena rendahnya kualitas tenaga kerja dan jumlah pekerjaan yang tidak proporsional. ([Kemenperin](#), 2017). Menurut buku Keynes yang berjudul “*The General Theory of Employment, Interest, and Money*”, berpendapat bahwa keseimbangan ekonomi bisa saja terjadi tanpa kesempatan kerja berada pada posisi *full employment*. Menurut Keynes kenyataan pasar tenaga kerja tidak bekerja sesuai dengan pandangan klasik. Dimanapun para pekerja mempunyai semacam serikat kerja (*laborunion*) yang akan berusaha memperjuangkan kepentingan buruh dari penurunan tingkat upah ([Subri](#), 2019). Minimnya kesempatan kerja menghadirkan berbagai pilihan bagi mereka yang mempersiapkan diri untuk bekerja. Di sisi lain, pekerja yang berpengalaman atau baru lulus lebih bersedia bekerja untuk upah yang jauh dari upah minimum yang diamanatkan negara ([Manggabarani & Triwahyuningtyas](#), 2019).

Sebagaimana daerah provinsi Jawa Barat yang masih memiliki masalah dalam penyerapan tenaga kerja. Daerah Jawa Barat masih belum mampu menyerap tenaga kerja yang ada, karena lapangan pekerjaan yang tersedia tidak sebanding dengan angkatan kerja yang ada. Hal ini terlihat dari persentase penyerapan tenaga kerja antar pulau Jawa, Jawa Barat berada pada urutan kelima sebesar 91,96%, dengan urutan pertama diperoleh Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 96,82%, dan urutan keenam diperoleh oleh Banten sebesar 91,89% ([BPS](#), 2020). Padahal jumlah penduduk dan tingkat upah di Jawa Barat sudah termasuk tinggi, sehingga diharapkan dapat mendorong penyerapan tenaga kerja yang ada ([Prenggondani](#), 2016).

Banyaknya karyawan yang bekerja merupakan contoh kondisi lapangan kerja yang tersedia. Semakin besar jumlah lapangan kerja yang tersedia maka semakin tinggi pula produktivitas keseluruhan suatu daerah ([ME](#), 2012). Jumlah penyerapan tenaga kerja di Jawa Barat dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 1.

Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja di Jawa Barat



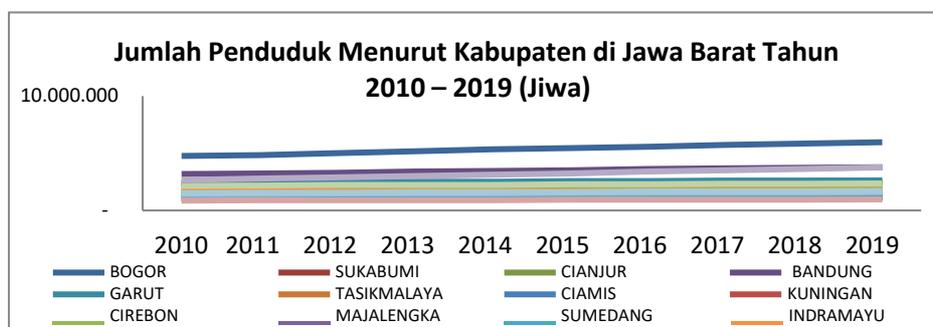
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020.

Sedikitnya 2 juta lapangan pekerjaan baru di Jawa Barat meningkat dibandingkan tahun 2010-2019 dengan jumlah angkatan kerja terbanyak sebesar 2.538.637 jiwa pada Kabupaten Bogor tahun 2019 dan jumlah penyerapan tenaga kerja terkecil diterima Kabupaten Purwarkarta pada tahun 2011 sebanyak 340.411 jiwa. Rendahnya penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Purwarkarta disebabkan karena perusahaan-perusahaan keberatan membayar upah minimum yang lebih tinggi, sehingga pada akhirnya perusahaan-perusahaan yang beritikad baik lebih banyak menggunakan teknologi yang berhubungan dengan energi robotik, mengakibatkan aktivitas penyerapan tenaga kerja di lapangan tidak dapat memenuhi permintaan masyarakat akan lapangan pekerjaan.

Tingginya penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Bogor disebabkan karena masih banyaknya yang bekerja pada sektor pertanian. Hal ini sesuai dengan potensi alam yang dimiliki oleh Kabupaten Bogor, bahwa sektor pertanian masih menjadi sektor yang paling banyak dalam menyerap tenaga kerja setelah sektor perdagangan, jika dibandingkan dengan sektor lain yang terdapat di Kabupaten Bogor sektor pertanian memiliki urutan ke dua dalam menyerap tenaga kerja. Jumlah penyerapan tenaga kerja di Jawa Barat ternyata mengalami penurunan pada Kabupaten Ciamis di tahun 2015 yang disebabkan karena masih rendahnya pendidikan yang ditempuh penduduk Kabupaten Ciamis, yaitu dengan pendidikan terakhir sekolah menengah atas (SMA). Hal tersebut yang membuat para penduduk sulit mendapatkan pekerjaan.

Salah satu faktor rendahnya tingkat penyerapan tenaga kerja adalah pertumbuhan penduduk di Jawa Barat. Jumlah penduduk yang besar dapat menggerakkan pasar dari sudut permintaan melalui *multiplier effect* karena adanya agregat *demand* yang tinggi. Sebagai sumber tenaga kerja, jumlah penduduk yang besar dapat menjadi motor penggerak perekonomian, namun pertumbuhan penduduk jika tidak diimbangi dengan peningkatan kesempatan kerja akan menimbulkan masalah ketenagakerjaan seperti meningkatnya pengangguran, kemiskinan, kejahatan, sosial ekonomi masyarakat dan fenomena lainnya (Khoirunnisa, 2020).

Gambar 2.
Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten di Jawa Barat



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

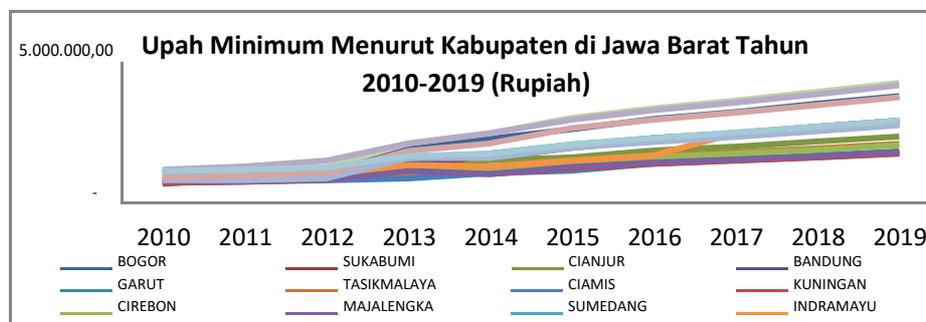
Pada periode tahun 2010-2019 jumlah penduduk Jawa Barat relatif meningkat dengan

jumlah penduduk tertinggi terdapat di Kabupaten Bogor sebesar 5.965.410 juta jiwa yang disebabkan karena tingginya tingkat kelahiran bayi tiap tahunnya dengan rata – rata kelahiran 100 bayi per harinya. Pada 2014 jumlah penduduk Kabupaten Ciamis mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu menjadi 1.162.102 juta jiwa yang disebabkan karena banyaknya penduduk yang mengikuti program keluarga berencana, dan ditahun yang sama tingkat kematian di Kabupaten Ciamis mengalami peningkatan.

Pertumbuhan penduduk yang berkelanjutan tidak selalu mendukung penyerapan lapangan kerja, yang pada gilirannya menciptakan lebih banyak pekerja, berdasarkan teori Malta, namun, ini tidak sebanding dengan jumlah pekerjaan yang tersedia, karena jumlah kesempatan terbatas, dan mereka yang bersaing untuk mendapatkan pekerjaan dan mereka yang tersingkir dari persaingan kehilangan pekerjaan (Qodrunnada, 2017).

Faktor selanjutnya yang akan mempengaruhi tenaga kerja untuk bekerja adalah upah minimum. Upah juga menjadi faktor utama bagi para pencari kerja di provinsi Jawa Barat, dengan adanya upah akan meningkatkan semangat para pekerja dalam menjalankan tugasnya. Semakin tinggi upah yang diberikan, maka para pekerja juga akan meningkatkan produktivitasnya dan produksi yang dihasilkan akan mencapai target (Priyono & Ismail, 2012). Bagi perusahaan, biaya produksi yang harus dijaga serendah mungkin, agar harga produk yang dihasilkan tidak terlalu tinggi, sehingga memperoleh keuntungan yang tinggi. (Asyhadie, 2017).

Gambar 3.
Upah Minimum Menurut Kabupaten di Jawa Barat



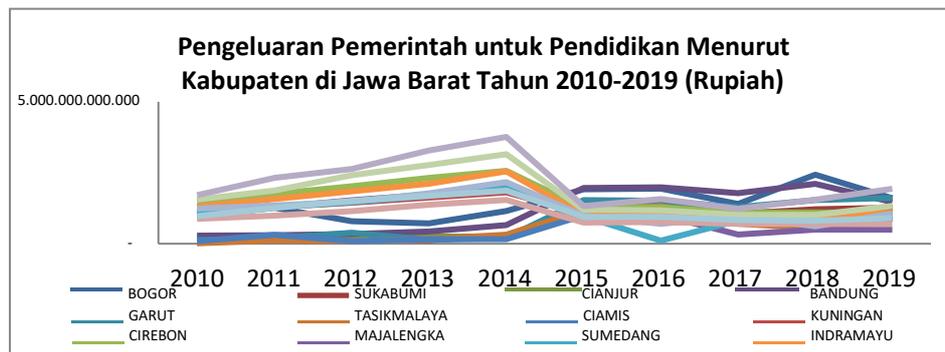
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

Kabupaten Bogor masih menjadi Kabupaten dengan upah tertinggi diantara yang lain, dengan jumlah upah tahun 2017 sebesar Rp.3.204.551,81 dan terus meningkat hingga tahun 2019 sebesar Rp. 3.763.405,88. Peningkatan upah minimum Kabupaten Bogor tahun 2019 sudah disesuaikan dengan perhitungan dari besarnya inflasise besar 3.39% ditambah besaran data pertumbuhan PDRB sebesar 5.12%. Pada tahun 2010 Kabupaten Sukabumi memiliki upah minimum terendah di Jawa Barat,yaitu sebesar Rp.671.500. atau naik berkisar 6.59% dari tahun sebelumnya, sedangkan dilihat dari jenis usaha, tercatat bahwa untuk industri susu suplement atau isonotik dan es krim menempati upah tertinggi dibanding sektor usaha lainnya.

Biaya pendidikan harus didistribusikan secara merata kepada semua golongan untuk meningkatkan jumlah tenaga kerja yang berkualitas. Tenaga kerja yang berkualitas lebih

mungkin untuk memasuki pasar tenaga kerja, sehingga pada akhirnya meningkatkan kesempatan kerja (Althofia & Agustina, 2015). Peran pemerintah dalam menentukan roda perekonomian sangat besar, terlihat dari besarnya pengeluaran pemerintah untuk pendidikan. Alokasi belanja sektor pendidikan di Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2019 sebesar Rp.11,3 triliun dengan tingkat penyerapan 97,010%. Alokasi belanja sektor pendidikan ini berfokus pada Indonesia pintar, beasiswa, pembinaan dan rehabilitasi lembaga pendidikan, pembinaan dan pelatihan guru, serta tunjangan guru (guru dan dosen) dan penghasilan tambahan di bidang program pendidikan dan hasil strategis.

Gambar 4.
Total Pengeluaran Pemerintah untuk Pendidikan di Jawa Barat



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

Seperti terlihat pada Gambar 4 di atas, pengeluaran pemerintah untuk pendidikan terus berfluktuasi dari tahun 2010-2019. Kabupaten Bogor menjadi Kabupaten dengan total pengeluaran pendidikan terbesar, yaitu Rp 2,429,340,000,000 pada tahun 2018, lalu turun pada tahun 2019 sebesar 1.603.540.000.000 yang diakibatkan karena penurunan pendapatan keseluruhan di Kabupaten Bogor. Pengeluaran pendidikan terendah diterima oleh Kabupaten Ciamis, yaitu sebesar Rp 7,440,915,000 pada tahun 2010. Rendahnya pengeluaran pendidikan di Kabupaten Ciamis disebabkan karena tidak terserapnya anggaran yang tersedia. Rendahnya anggaran pendidikan karena anggaran 2010 memprioritaskan sektor perumahan dan sektor lain yang terkena dampak gempa. (Garut, 2014).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder, dimana data tersebut merupakan hasil olahan dari instansi-instansi terkait dan telah dipublikasikan. Instansi yang dimaksud adalah Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat dan *website* Provinsi Jawa Barat tentang surat Keputusan Gubernur Jawa Barat No.561/Kep.1322-Bangsos/2015 dan No.561/Kep. 1581-Bangsos/2014 mengenai standar upah yang berlaku, serta publikasi dari *website* Neraca Pendidikan Daerah.

Selain itu, juga diperlukan studi pustaka untuk memperoleh literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Data yang digunakan berupa data panel yang merupakan gabungan data silang (*cross section*) yaitu 17 Kabupaten di Jawa Barat, dengan data runtut waktu (*time series*) yaitu dari tahun 2010-2019. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis regresi data panel, koefisien determinasi, uji t (uji parsial) dan uji F (uji simultan). Sebelum

model regresi digunakan untuk menguji hipotesis, maka terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas). Dalam penelitian ini, teknik analisis datadilakukan dengan bantuan program *software statistic eviews 9*.

Hasil dan Pembahasan

A. Analisis Data

1. Uji Normalitas

Tabel 1.

Hasil Uji Normalitas

<i>Jarque Bera</i>	5.267555
<i>Probability</i>	0.071807

Sumber: Hasil Olah Data Eviews 9

Berdasarkan hasil uji normalitas pada tabel 1 menunjukkan bahwa nilai *Jarque Bera* sebesar 5.267555 dan probabilitas sebesar 0.071807 lebih besar dari $\alpha = 5\%$, dapat disimpulkan bahwa data sudah terdistribusi normal.

2. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara faktor pengganggu yang satu dengan lainnya (*non autokorelation*), dengan ketentuan:

- Nilai D-W < (-) 2 berarti terdapat masalah autokorelasi positif.
- Nilai D-W di antara (-) 2 sampai 2 berarti tidak terdapat masalah autokorelasi.
- Nilai D-W > 2 berarti terdapat masalah autokorelasi negatif ([Santoso, 2019](#)).

Tabel 2.

Hasil Uji Autokorelasi

<i>Mean dependent var</i>	240894.0
S.D. dependent var	146472.3
<i>Sum squared resid</i>	3.24E+11
Durbin-Watson stat	1.559806

Sumber: Hasil Olah Data Eviews 9

Berdasarkan tabel 2 di atas diperoleh nilai *Durbin Watson* sebesar 1.559806 lebih kecil dari 2 ($1.559806 < 2$) sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat masalah auto korelasi.

3. Uji Multikolinearitas

Uji multi kolinearitas dilihat dari nilai tolerance dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Apabila nilai VIF < 10, berarti tidak terdapat multi kolinearitas. Jika nilai VIF > 10 maka terdapat multikolinearitas dalam data ([Ghozali, 2018](#)).

Tabel 3
Hasil Uji Multikolinearitas

	jumlah penduduk	upah	pengeluaran pemerintah
jumlah penduduk	1.000000	0.322258	0.198055
upah	0.322258	1.000000	0.209097
minimum pengeluaran pemerintah	0.198055	0.209097	1.000000

Sumber: Hasil Olah Data Eviews 9

4. Uji Heteroskedastisitas

Dikatakan terbebas dari masalah heterojika nilai probabilitas $> \alpha = 5\%$, dan sebaliknya dikatakan terdapat masalah hetero jika nilai probabilitas $< \alpha = 5\%$ (Ghozali, 2018).

Tabel 4.
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	38106.57	11474.65	3.320936	0.0011
jumlah penduduk	0.006602	0.004534	1.456318	0.1472
upah minimum	0.001037	0.003653	0.283942	0.7768
pengeluaran pemerintah	-4.08E-09	4.42E-09	-0.924979	0.3563

Sumber: Hasil Olah Data Eviews 9

Berdasarkan hasil uji Heteroskedastisitas pada tabel 4 diketahui nilai probabilitas setiap variabel sudah di atas $\alpha = 5\%$, sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap variabel sudah terbebas dari masalah hetero skedastisitas.

5. Uji Chow

Uji Chow adalah uji statistik untuk memilih manakah model yang baik antara *Common Effect* atau *Fixed Effect Model* (FEM).

Tabel 5.
Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	11.936540	(16,150)	0.0000
Cross-section Chi-square	139.604361	16	0.0000

Sumber: Hasil Olah Data Eviews 9

Berdasarkan hasil uji chow pada tabel 5 diketahui nilai probabilitas *Cross-section Chi-square* sebesar $0.0000 < \alpha = 5\%$, sehingga dapat disimpulkan bahwa

model yang baik digunakan adalah model *fixed effect*.

6. Uji Hausman

Uji Hausman digunakan untuk memilih antara model terestimasi *Fixed Effect Model* (FEM) atau *Random Effect Model* (REM).

Tabel 6.
Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	7.526533	3	0.0569

Sumber: Hasil Olah Data Eviews 9

Berdasarkan hasil uji hausman pada tabel 6 diketahui nilai probabilitas *Cross-section* sebesar $0.0569 > \alpha = 5\%$, sehingga dapat disimpulkan bahwa model yang baik digunakan adalah model *random effect* dan dilanjutkan dengan uji *Lagrange Multiplier*.

7. Uji Lagrange Multiplier

Uji *Lagrange Multiplier* digunakan untuk memilih model yang baik digunakan antar *common effect* atau *random effect* Dikatakan tidak berpengaruh jika nilai *P-Value Breusch Pagan* lebih besar dari $\alpha = 5\%$ dan model yang dipilih adalah model *common effect*. Model *random effect* dapat dipilih jika memiliki nilai *P-Value Breusch Pagan* yang signifikan yaitu lebih kecil dari $\alpha = 5\%$ ([Ansofino et al., 2016](#)).

Tabel 7.
Hasil Uji Lagrange Multiplier

	<i>Cross-section</i>	<i>Time</i>	<i>Both</i>
Breusch-Pagan	169.6864 (0.0000)	12.37554 (0.0004)	182.0620 (0.0000)
Honda	13.02637 (0.0000)	3.517888 (0.0002)	11.69856 (0.0000)
King-Wu	13.02637 (0.0000)	3.517888 (0.0002)	10.63013 (0.0000)
<i>Standardized</i> Honda	14.43436 (0.0000)	4.230652 (0.0000)	9.400738 (0.0000)
<i>Standardized</i> King-Wu	14.43436 (0.0000)	4.230652 (0.0000)	8.337787 (0.0000)
Gourierioux, et al.*	--	--	182.0620 (< 0.01)

Sumber: Hasil Olah Data eviews

Berdasarkan hasil uji lagrange multiplier pada tabel 7, nilai *P-Value Breusch Pagan* sebesar 0.0000 lebih kecil dari $\alpha = 5\%$ sehingga dapat disimpulkan

bahwa model yang baik digunakan adalah model *random effect*.

8. Regresi Model Random Effect

Tabel 8.
Hasil Regresi Model Random Effect

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-7193.022	24716.3 9	-0.291022	0.7714
jumlah penduduk	0.389273	0.01067 8	36.45494	0.0000
upah minimum	0.029305	0.00506 4	5.787442	0.0000
pengeluaran pemerintah	2.36E-09	6.04E-09 09	0.391598	0.6959
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			47589.90	0.5437
Idiosyncratic random			43594.55	0.4563
Weighted Statistics				
R-squared	0.910616	Mean dependent var	240894.0	
Adjusted R-squared	0.909001	S.D. dependent var	146472.3	
S.E. of regression	44184.92	Sum squared resid	3.24E+11	
F-statistic	563.7206	Durbin-Watson stat	1.559806	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Hasil Olah Data Eviews 9

Berdasarkan uji *model random effect* pada tabel 8 diatas, maka dapat dibuat model persamaan pada *random effect*. Model persamaan tersebut sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_{\#} + \beta_{\$}JPDDK_{it} + \beta_2UPAH_{it} + \beta_{\&}PP_{it} + \varepsilon_{it} \quad (1)$$

$$PTK = -7193.022 + 0.389273 JPDDK_{it} + 0.029305 UPAH_{it} + 2.36E - 09 PP_{it} + \varepsilon_{it} \quad (2)$$

Keterangan:

PTK: Penyerapan Tenaga Kerja

i: Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat

t: Waktu (periode tahun 2010 – 2019)

$\beta_1 - \beta_4$: Koefisien

JPDDK : Jumlah Penduduk (jiwa)

UPAH : Tingkat Upah Minimum (Rupiah)

PP: Pengeluaran Pemerintah (Rupiah)

ε : Error Term

9. Uji Parsial (Uji t)

Pada uji t diperlukan hasil dari perhitungan $df = n-k$, dimana nilai n merupakan

jumlah observasi dan k merupakan keseluruhan variabel baik variabel independen maupun variabel independent. Penelitian ini memiliki jumlah observasi sebanyak 170, k sebanyak 4, sehingga diperoleh nilai $df = 166$. Berdasarkan nilai $df = 166$ dan taraf alpha 5%, maka diketahui nilai T_{tabel} sebesar 1.97436.

Tabel 9.
Hasil Uji T

Variable	t-Statistic	Prob.
C	-0.291022	0.7714
Jumlah Penduduk	36.45494	0.0000
Upah Minimum	5.787442	0.0000
Pengeluaran Pemerintah	0.391598	0.6959

Sumber: Hasil Olah Data Eviews 9

Berdasarkan hasil regresi pada tabel 9, jumlah penduduk memiliki nilai t_{hitung} (36.45494) > t_{tabel} (1.97436). Nilai probabilitas variabel jumlah penduduk sebesar 0.0000 lebih kecil dari $\alpha = 5\%$ (0.0000 < 0.05), sehingga secara statistik variabel jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap variabel penyerapan tenaga kerja. Untuk variabel upah minimum memiliki nilai t_{hitung} (5.787442) > t_{tabel} (1.97436) serta nilai probabilitas sebesar 0.0000 lebih kecil dari $\alpha = 5\%$ (0.0000 < 0.05), sehingga secara statistik variabel upah minimum berpengaruh signifikan terhadap variabel penyerapan tenaga kerja. Sedangkan variabel pengeluaran pemerintah memiliki nilai t_{hitung} (0.391598) < t_{tabel} (1.97436). Nilai probabilitas variabel pengeluaran pemerintah sebesar 0.6959 lebih besar dari $\alpha = 5\%$ (0.6959 > 0.05), sehingga secara statistik variabel pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel penyerapan tenaga kerja.

10. Uji Simultan (Uji F)

Uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari seluruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

Tabel 10
Hasil Uji F

F-statistic	563.7206
Prob(F-statistic)	0.000000
F-Tabel	2.66

Sumber: Hasil Olah Data Eviews 9

Berdasarkan tabel 10 di atas diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 563.7206 lebih besar dari F_{Tabel} 2.66 (563.7206 > 2.66), serta diperoleh nilai probability F-Statistik sebesar 0.00000 (0.0000 > $\alpha = 0.05$) maka dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk, upah minimum, dan pengeluaran pemerintah secara bersama-sama memengaruhi penyerapan tenaga kerja.

11. Uji Adjusted R-Square

Uji *Adjusted R-Square* dilakukan untuk mengetahui besarnya variasi dari variabel independen yang dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen dan sisanya yang tidak dapat dijelaskan merupakan bagian variasi dari variabel lain yang tidak termasuk di dalam model.

Tabel 11.

Hasil Uji Adjusted R-Square	
Adjusted R-square	0.909001

Sumber: Hasil Olah Data Eviews 9

Berdasarkan tabel 11 diatas, diperoleh nilai *Adjusted R-Square* sebesar 0.909001, maka jumlah penduduk, upah minimum, dan pengeluaran pemerintah dapat mempengaruhi penyerapan tenaga kerja secara bersama-sama sebesar 90.90% dan sisanya 9.1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

12. Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Berdasarkan hasil uji, diketahui jumlah penduduk berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja, berarti jika jumlah penduduk meningkat satu-satu akan membuat penyerapan tenaga kerja meningkat. Begitupun sebaliknya jika penduduk mengalami penurunan akan membuat penyerapan tenaga kerja ikut menurun. Halini sesuai dengan teori Keynes yang mengatakan bahwa perekonomian ditentukan oleh apa yang terjadi dengan permintaan agregat masyarakat. Permintaan agregat tersebut dipengerahi oleh beberapa sektor diantaranya adanya konsumsi rumah tangga yang artinya banyak sedikitnya suatu barang yang dikonsumsi masyarakat, dapat berpengaruh terhadap permintaan agregat tersebut sehingga menambahkan modal pemerintah dalam memaksimalkan penyerapan tenaga kerja.

13. Analisis Pengaruh Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Berdasarkan hasil uji, diketahui upah minimum berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja, berarti jika tingkat upah minimum meningkat satu satuan akan membuat penyerapan tenaga kerja meningkat. Begitupun sebaliknya jika tingkat upah minimum mengalami penurunan akan membuat penyerapan tenaga kerja ikut menurun. Hasil uji ini sesuai dengan teori Keynes yang mengatakan bahwa setiap peningkatan upah juga ditandai dengan kenaikan permintaan barang dan jasa. Kenaikkan permintaan barang dan jasa akan menyebabkan produksi barang dan jasa perusahaan meningkat, yang pada akhirnya akan meningkatkan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan.

14. Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Berdasarkan hasil uji, diketahui bahwa pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja, berarti semakin naik atau menurunnya tingkat pengeluaran pemerintah untuk pendidikan tidak langsung mempengaruhi tenaga kerja yang ada, karena lamanya pendidikan akan mempengaruhi kualitas sumber daya manusia. Hasil pengujian ini tidak sesuai dengan teori Keynes bahwa dengan meningkatnya pengeluaran pemerintah dan pemotongan pajak, akan ada

peningkatan kebutuhan untuk menyuntikkan ke dalam aliran pendapatan nasional dan menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan. Bidang pendidikan juga perlu campur tangan pemerintah dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk bisa mengenyam pendidikan agar memperoleh kehidupan yang lebih baik, salah satunya yaitu melalui pengeluaran pemerintah.

Kesimpulan

Pada hasil uji regresi dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk memiliki pengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di Jawa Barat. Jumlah penduduk di Jawa Barat yang setiap tahunnya terus meningkat secara signifikan merupakan modal yang cukup bagi tersedianya tenaga kerja untuk menggerakkan roda pembangunan di daerah ini. Hal ini berarti jumlah penduduk merupakan potensi sumberdaya manusia yang dapat diandalkan, ketika jumlah penduduk di suatu daerah bertambah maka makin besar pula jumlah orang yang mencari pekerjaan.

Upah minimum memiliki pengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di Jawa Barat. Upah minimum di Jawa Barat yang setiap tahunnya relatif meningkat merupakan motivasi yang akan meningkatkan produktivitas karyawan dalam bekerja. Peningkatan upah juga ditandai dengan kenaikan permintaan barang dan jasa. Kenaikkan permintaan barang dan jasa akan menyebabkan produksi barang dan jasa perusahaan meningkat, yang pada akhirnya akan meningkatkan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan.

Pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh terhadap variabel penyerapan tenaga kerja di Jawa Barat. Pengeluaran pemerintah ini ditujukan untuk sektor pendidikan di Jawa Barat. Pengeluaran pemerintah untuk pendidikan di Jawa Barat yang setiap tahunnya relatif berfluktuatif menandakan bahwa penyerapan tenaga kerja tidak selalu dipengaruhi oleh tingginya pengeluaran untuk pendidikan di Jawa Barat. Diketahui jumlah penduduk, upah minimum, dan pengeluaran pemerintah dapat mempengaruhi penyerapan tenaga kerja secara bersama-sama.

BIBLIOGRAFI

- Althofia, N. Y., & Agustina, N. (2015). *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah untuk Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur terhadap PDRB dan Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Barat Tahun 2012*. *Jurnal Aplikasi Statistika Dan Komputasi Statistik*, 7(1), 1–20. <https://doi.org/10.34123/jurnalasks.v7i1.118>
- Ansofino, Jolianis, Yolamalinda, & Arfilindo, H. (2016). *Buku Ajar Ekonometrika*. Deepublish.
- Asyhadie, Z. (2017). *Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*. PT Raja Grafindo Persada.
- BPS. (2020). *Penduduk Bekerja Menurut Provinsi dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu, 2008 - 2020*. Badan Pusat Statistik.
- Garut, R. P. (2014). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut 2014-2019*. Perda Kabupaten Garut, 3.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Kemenperin. (2017). *Majalah Media Industri*. Kementerian Perindustrian.
- Khoirunnisa, S. (2020). *Pengaruh Upah Minimum, Investasi, dan Jumlah Kunjungan Wisatawan Terhadap Tingkat Pengangguran di Provinsi NTB*. *Jurnal Ilmiah*, 8(2), 1–6.
- Manggabarani, A. S., & Triwahyuningtyas, N. (2019). *Menciptakan Lapangan Kerja Bagi Fresh Graduate Melalui Program Workshop Dan Seminar Move On Entrepreneur*. *Jurnal Komunitas : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 44–50. <https://doi.org/10.31334/jks.v2i1.292>
- ME, J. (2012). *Analisis Perekonomian Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat*. *Economica: Jurnal Program Studi Pendidikan Ekonomi STKIP PGRI Sumatera Barat*, 1(1), 32–43.
- Prenggondani, R. S. (2016). *Pengaruh PDRB, Upah Minimum, dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Pada Kabupaten / Kota di Jawa Barat Tahun 2007-2014*. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (JBE)*, 2–3.
- Priyono, & Ismail, Z. (2012). *Teori Ekonomi* (T. Chandra (ed.); Pertama). Dharma Ilmu.
- Qodrunnada, L. (2017). *Analisis Pengaruh Pendidikan Pertumbuhan Ekonomi dan Rasio Gini terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010-2015*.
- Santoso, S. (2019). *Mahir Statistik Parametrik*. PT Elex Media Komputindo.
- Subri, M. (2019). *Ekonomi Sumber Daya Manusia dalam Perspektif Pembangunan (Revisi)*. PT Raja Grafindo Persada.